

# **BAB I**

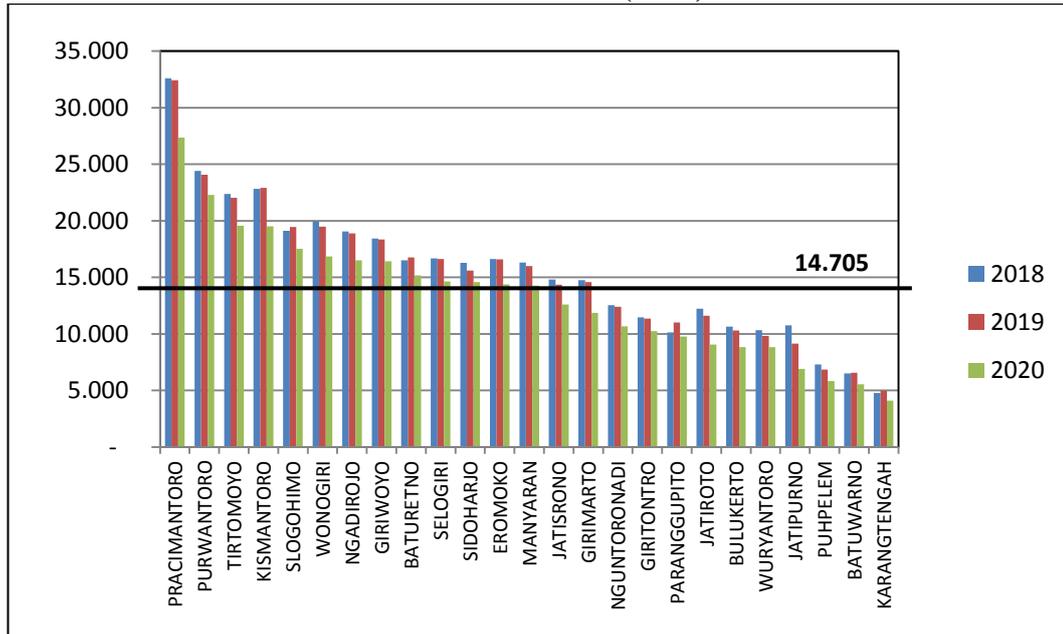
## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wonogiri merupakan kabupaten terluas keempat dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah penduduk menurut Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sekitar 1.043.177 jiwa. Dengan populasi penduduk sebanyak itu membuat Wonogiri tidak luput dari permasalahan yang terjadi, seperti kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata (Rasu et al., 2019).

Penduduk Wonogiri saat ini masih banyak yang hidup dalam keadaan miskin bahkan sangat miskin, yang membuat mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020 jumlah penduduk miskin di Wonogiri sekitar 333.322 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Wonogiri. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonogiri 2016 menilai persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah Kabupaten. Kemiskinan menjadi masalah krusial di Wonogiri, pengentasan kemiskinan menjadi komitmen pemerintah.

**Grafik 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri**  
**Tahun 2018-2020 (Jiwa)**



**Sumber:** Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Wonogiri, diolah.

Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa selama tahun 2018-2020, jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kecamatan Pracimantoro, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Kecamatan Karangtengah. Potensi Daerah Karangtengah diantaranya potensi seni budaya karawitan dan pedalangan di Desa Jeblogan dan Tembora serta potensi sumber daya alam berupa tanaman perkebunan, yaitu cengkeh, durian, janggolan, dan aneka perkebunan lainnya.

Dana desa merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan secara langsung dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Menurut Azwardi & Sukanto (2014) dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pada umumnya alokasi dana desa menjadi sumber utama pemerintah desa untuk operasional pemerintah desa (30%) dan pemberdayaan masyarakat desa (70%), seperti menanggulangi kemiskinan

dan meningkatkan perekonomian desa. Penggunaan dana yang dialokasikan untuk setiap desa ditujukan untuk pembangunan segala infrastruktur yang dianggap dapat mendorong perekonomian pedesaan. Dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan (Bempah, 2013).

**Tabel 1. 1**  
**Alokasi Dana Desa (ADD) per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri**  
**Tahun 2018-2020 (Rupiah)**

No.	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Pracimantoro	8.753.801.000	9.201.632.000	9.879.135.000
2	Jatisrono	6.501.260.000	6.735.947.000	6.768.331.000
3	Eromoko	6.412.867.000	6.724.193.000	7.002.749.000
4	Giriwoyo	6.335.222.000	6.589.664.000	6.644.433.000
5	Slogohimo	6.280.821.000	6.475.458.000	6.381.362.000
6	Tirtomoyo	5.928.000.000	6.203.921.000	6.645.409.000
7	Baturetno	5.686.988.000	5.891.660.000	6.396.939.000
8	Jatiroto	5.573.839.000	5.761.510.000	5.612.667.000
9	Purwantoro	5.527.718.000	5.692.457.101	5.725.912.000
10	Girimarto	5.390.858.000	5.599.402.000	5.692.572.000
11	Sidoharjo	4.920.492.000	5.154.537.000	5.146.265.000
12	Selogiri	4.620.558.000	4.821.319.000	5.197.659.000
13	Ngadirojo	4.503.647.000	4.719.964.000	5.402.110.000
14	Jatipurno	4.221.502.000	4.402.459.000	4.662.914.000
15	Wonogiri	4.087.116.200	4.249.906.000	4.395.685.000
16	Nguntoronadi	3.993.195.000	4.146.873.000	3.933.653.000
17	Paranggupito	3.980.229.000	4.169.292.000	4.189.937.000
18	Bulukerto	3.724.429.000	3.830.926.000	4.041.994.000
19	Kismantoro	3.470.497.000	3.566.221.000	3.621.507.000
20	Batuwarno	3.253.222.000	3.398.351.000	3.533.331.000
21	Wuryantoro	2.943.971.000	3.084.633.000	3.233.474.000
22	Giritontro	2.604.212.000	2.738.728.000	2.998.489.000
23	Manyaran	2.575.885.000	2.700.145.000	3.120.885.000
24	Karangtengah	2.498.130.000	2.612.644.000	2.789.104.000
25	Puhpelem	2.136.357.000	2.201.044.000	2.216.890.000
<b>Jumlah</b>		<b>115.924.816.200</b>	<b>120.672.886.101</b>	<b>125.233.406.000</b>

**Sumber:** Peraturan Bupati (Perbub) Wonogiri, diolah.

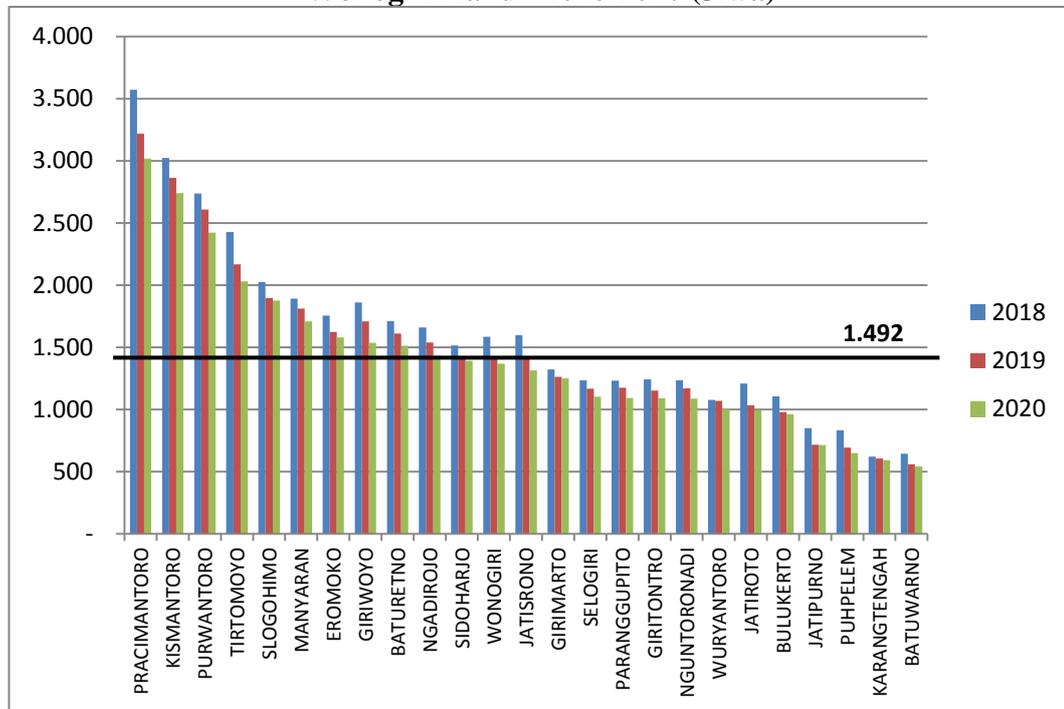
Dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan, Pemerintah telah melakukan program untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Program Bantuan Sosial sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 2020 di Kabupaten Wonogiri sejumlah 31.314 rumah tangga menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 291.771 jiwa menerima bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Penerima Bantuan Iuran (PBI)/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 28.014 rumah tangga menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), 66.524 rumah tangga menerima Bantuan Sosial Pangan (BSP).

Menurut Sekretaris Korpri Unit Nasional Kementerian Sosial RI, Marsali S.H. bantuan sosial yang diserahkan dari Kementerian Sosial RI pada Kabupaten Wonogiri tahun 2018 sebesar Rp 184.800.210.000. Jumlah tersebut terdiri atas bantuan PKH non tunai sebesar Rp 80.767.410.000 bagi 42.369 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) sebesar Rp 98.656.800.000 bagi 74.740 keluarga, dan bantuan lanjut usia sebesar Rp

5.276.000.000 bagi 2.688 jiwa. Penyaluran dana PKH merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat, dalam gerakan pengentasan kemiskinan secara terpadu (Humas Wonogiri, 2018).

**Grafik 1. 2**  
**Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020 (Jiwa)**



**Sumber:** Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Wonogiri, diolah

Dari Grafik 1.2 terlihat bahwa jumlah penerima dana PKH dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Menurut Koordinator PKH Wonogiri, Agus Suratno penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terjadi karena KPM yang telah mampu mengundurkan diri dan sudah tidak memenuhi komponen yang disyaratkan, seperti anak sudah lulus SMA/SMK atau orang lanjut usia (lansia) usianya sudah tak menerima bansos lagi. Sebab, syarat usia orang lansia penerima pada program tahun ini lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya (Hartono, 2020). Penerima dana PKH tertinggi yaitu Kecamatan

Pracimantoro, sesuai dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Sedangkan penerima dana PKH terendah yaitu Kecamatan Batuwarno.

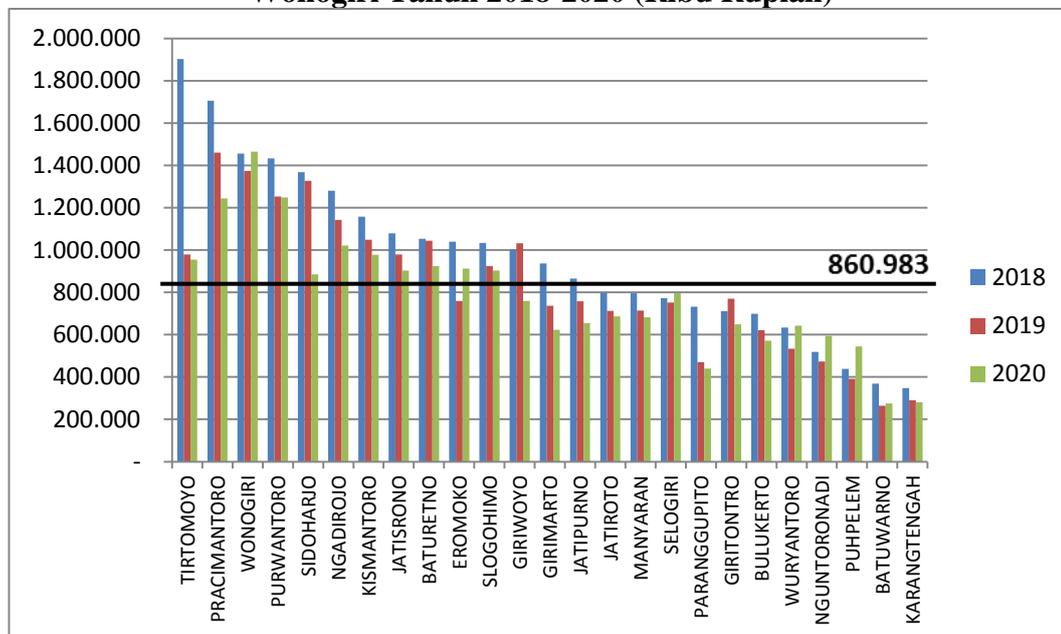
Kemiskinan yang cukup tinggi juga berdampak kepada anak usia sekolah dalam pendidikannya. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk menanggulangi hal tersebut dengan diadakannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun saat ini pemerintah menamainya dengan Program Beasiswa Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014 (Ningsih et al., 2017).

Pada tahun 2014, presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP) serta Program Indonesia Sehat (PIS) dalam membangun keluarga yang produktif sebagai program pengentasan kemiskinan. Instruksi presiden tersebut mengamanatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu siswa miskin, sehingga dapat memperoleh pendidikan yang layak (Djoyosuroto & Srihandayani, 2018).

Perkembangan dana Program Indonesia Pintar (PIP) per kecamatan di Kabupaten Wonogiri selama tahun 2018-2020 tersaji dalam Grafik 1.3. Dana PIP selama tiga tahun tersebut mengalami fluktuasi. Penerima dana PIP tertinggi tahun 2018 yaitu Kecamatan Tirtomoyo lalu diikuti Kecamatan Pracimantoro. Namun dana PIP di Kecamatan Tirtomoyo dua tahun setelahnya mengalami penurunan

drastis, dikarenakan penurunan jumlah dana PIP yang diterima siswa karena berada di tingkat akhir sekolah dan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menerima dana PIP seperti siswa telah lulus sekolah.

**Grafik 1. 3**  
**Dana Program Indonesia Pintar (PIP) per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020 (Ribu Rupiah)**



**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, diolah

Meskipun banyak program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, kemiskinan di Kabupaten Wonogiri ini masih cukup tinggi. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh program-program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh program pemerintah Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar

(PIP) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri tahun 2018-2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui arah dan besarnya pengaruh program pemerintah Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri tahun 2018-2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

Bagi otoritas pembuat kebijakan, baik Pemerintah di masing-masing kecamatan dan Dinas Sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan agar kedepan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Memberikan masukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih selektif sehingga KIP benar-benar tepat sasaran bagi siswa yang benar-benar tidak mampu. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya rujukan atau pustaka mengenai pengaruh program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.

### **E. Metode Penelitian**

#### **E.1. Alat dan Model Penelitian**

Alat analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model ekonometrik yang dirumuskan sebagai berikut:

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogADD}_{it} + \beta_2 \text{LogPKH}_{it} + \beta_3 \text{LogPIP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

$P$	= Persentase penduduk miskin per kecamatan di Kabupaten Wonogiri (Persen)
$ADD$	= Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonogiri (Rupiah)
$PKH$	= Jumlah dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonogiri (Rupiah)
$PIP$	= Jumlah dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonogiri (Rupiah)
$Log$	= Operator logaritma berbasis $e$
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi variabel independen
$\varepsilon$	= <i>error term</i> (faktor kesalahan)
$i$	= <i>cross section unit</i> seluruh kecamatan di Kabupaten Wonogiri
$t$	= <i>time series unit</i> seluruh kecamatan di Kabupaten Wonogiri (waktu pengamatan tahun 2018-2020)

## E.2. Data dan Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data panel, yang merupakan pengamatan dari 25 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, selama tahun 2018 hingga 2020, terhadap data Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diproksi dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri. Data akan diperoleh dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonogiri, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Wonogiri.

## F. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan model penelitian, data dan sumber data penelitian. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang yang relevan dengan penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis masalah dalam penelitian, menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, menggambarkan kerangka teori, serta pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis serta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup bab ini adalah interpretasi hasil penelitian, yakni uraian mengenai kondisi dan masalah yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan stakeholder, serta bagi penelitian yang selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**